

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (Studi Kasus Dalam Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya)**

**Sandi Lesmana\*, Agus Fatah Hidayat, Rustandi , Acep Hilman**

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: \* lesmanasandi7199@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa merupakan aspek integral dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Potensi efektivitas dan efisiensi yang dapat diperoleh dari pengadaan tersebut memperlihatkan pentingnya dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk merinci fokus pada Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya, dengan tujuan memberikan gambaran konkret mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam konteks organisasi yang spesifik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan rencana aksi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa. Pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut menjadi kunci untuk kesuksesan implementasi kebijakan tersebut secara efisien dan efektif.*

*Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa.*

## **PENDAHULUAN**

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks birokrasi pemerintahan sangatlah penting. Manajemen SDM bertugas memastikan bahwa organisasi pemerintah memiliki personel yang kompeten dan terlatih untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelenggarakan layanan dan kegiatan pemerintahan dengan efisien. Dalam pengembangan SDM, pemerintahan memerlukan perencanaan serta implementasi berbagai program pengembangan dan pelatihan

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Hal ini penting agar pegawai pemerintah selalu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan tugas yang berkembang.

Istilah MSDM (Bohlander & Snell, 2016) **menyatakan:** “MSDM adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai”. Manajemen SDM bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola kebutuhan pegawai, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, hingga promosi. Dengan merancang strategi rekrutmen yang efektif, pemerintah dapat menarik individu yang berkualitas untuk bergabung dengan birokrasi. Kesejahteraan dan motivasi pegawai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan birokrasi. Manajemen SDM memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, menyediakan insentif yang tepat, serta mengelola hubungan industri untuk memastikan bahwa pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal.

Manajemen SDM memerlukan keselarasan dengan kebijakan pemerintah, memiliki pemahaman yang baik tentang arah strategis yang diinginkan oleh pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan SDM mendukung pencapaian tujuan pemerintahan secara keseluruhan, yang melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur untuk memastikan pegawai bertindak sesuai dengan standar etika, mempertanggungjawabkan tindakan mereka, serta mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, terlibat dalam pengembangan karier yang berkelanjutan.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan. SDM yang terampil dan terlatih dapat lebih memahami kebijakan yang diterapkan, memungkinkan implementasi yang lebih efektif dan efisien. Penting untuk melakukan pengembangan SDM, di mana pegawai di BKPSDM Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya terkait manajemen pengadaan barang/jasa, hal tersebut meliputi pemahaman mendalam tentang proses pengadaan, peraturan terkini, dan keterampilan teknis yang diperlukan, sehingga mendorong inovasi dalam penyusunan rencana aksi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak positif pada kualitas layanan yang diberikan oleh BKPSDM Kota Tasikmalaya, menciptakan kepercayaan masyarakat dan pihak terkait. Pengembangan SDM juga melibatkan pemberdayaan pegawai untuk mengambil inisiatif, berkolaborasi, dan bekerja mandiri, meningkatkan produktivitas, kreativitas, serta kemampuan dalam mengelola risiko dalam proses pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan. Istilah kebijakan menurut Anderson (Wahab, 2008) menyatakan: “Kebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya merupakan unit organisasi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020. Sebelumnya, fungsi pengadaan dilaksanakan di

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tasikmalaya, yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2013. Sejalan dengan evolusi regulasi, terutama Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, layanan pengadaan telah didirikan sebagai entitas mandiri. Dalam struktur ULP Kota Tasikmalaya, Kepala ULP dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. Sekretaris ULP, di sisi lain, dipegang oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan di Bagian Administrasi Pembangunan. Struktur ULP juga mencakup Staf Pendukung di Bagian Administrasi Pembangunan dan Kelompok Kerja (POKJA) ULP. Setelah terjadi perubahan regulasi, khususnya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, layanan pengadaan telah didirikan sebagai bagian/organisasi independen.

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa telah diubah menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Terkait dengan sistem pengadaan yang digunakan, Kota Tasikmalaya menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang berada di bawah Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2020, ULP dan LPSE telah digabungkan menjadi Bagian Pengadaan Barang/Jasa atau Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ). Sebelum pembentukan UKPBJ, sub-sub bagian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit kerja yang terpisah. Diharapkan bahwa perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Lebih lanjut, dalam jabatan fungsional tertentu, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jenis jabatan fungsional khusus bagi PNS yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan tentang Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, PNS yang menduduki jabatan fungsional pengelola barang dan jasa diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Sementara berdasarkan Perka LKPP No 10160/D/31-05/2021, mengenai rekomendasi kebutuhan pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Tasikmalaya sebanyak 31 orang, sebenarnya hanya terpenuhi 25% dari jumlah yang seharusnya. Di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, ada 14 orang pengelola, di mana 8 orang telah menduduki jabatan fungsional Pengadaan Barang/Jasa, sementara 6 orang belum. Dari potensi 60 orang pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ada di OPD Kota Tasikmalaya, masih ada 66 orang lain yang dapat diarahkan menjadi JF PPBJ untuk memenuhi rekomendasi LKPP. Resiko ketidakseimbangan ini berdampak pada pemilihan penyedia yang kurang efektif dan lambatnya penyerapan anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan Barang/Jasa.

Peraturan di atas merupakan salah satu kebijakan publik, menurut Anderson (Islamy, 2004) menyatakan: "Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah". Setiap kebijakan tentu harus diimplementasikan dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana dikemukakan (Nugroho, 2017) menyatakan: "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Berdasarkan hal tersebut bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah atau badan pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya dari data lapangan menunjukkan beberapa permasalahan, antara lain, kemampuan pelaksana kebijakan yang belum mencapai target, serta kurangnya hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini memerlukan peningkatan komunikasi antara OPD untuk pengembangan SDM yang sesuai dengan rekomendasi Pengelolaan PBJ. Pelatihan, pengembangan keterampilan, peningkatan kualifikasi, dan penambahan personel baru diperlukan untuk memastikan pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai beban tambahan, menyebabkan kurangnya optimalisasi pertanggungjawaban. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penyesuaian prioritas dan fokus bagi pejabat pengadaan, serta peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen melalui bimbingan teknis. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya pembenahan dan perbaikan diperlukan untuk mencapai tingkat optimalitas dalam implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Adriansyah, dkk. 2021).

Penelitian selanjutnya menunjukkan faktor sumber daya, termasuk ketersediaan dan alokasi yang tepat, memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan kebijakan e-procurement. Komunikasi juga terbukti sebagai aspek krusial, di mana kurangnya komunikasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat, memperbaiki komunikasi, mengalokasikan sumber daya secara lebih baik, serta melakukan perbaikan pada struktur birokrasi guna meningkatkan pelaksanaan kebijakan ini di masa depan (Syarifuddin, 2019).

Hasil penelitian dari hasil implementasi kebijakan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa menunjukkan terdapat beberapa proyek yang tidak diperiksa secara menyeluruh, sehingga menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tanpa evaluasi yang memadai. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup tindakan tegas terhadap oknum yang mencoba memanfaatkan proyek untuk keuntungan pribadi, penyediaan anggaran proyek secara tepat waktu oleh pemerintah, perbaikan sistem informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek dengan lebih efisien, dan tindakan tegas dari pemeriksa terhadap kualitas barang dan jasa sebelum serah terima. Secara keseluruhan, pemimpin dan instansi terkait perlu mengambil

langkah-langkah konkret untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa guna memastikan keberhasilan proyek dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Andi, 2023).

Pencapaian dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan perlu memperhatikan berbagai faktor, diantaranya faktor kondisi lingkungan perlu diperhatikan karena setiap lingkungan memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda. Memahami konteks lingkungan akan membantu dalam menyesuaikan strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan program. Selain itu, hubungan antar organisasi juga memegang peranan penting. Kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan mendukung kelancaran pelaksanaan program serta meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Sumber daya organisasi, baik itu finansial maupun manusia, juga harus dipertimbangkan dengan matang.

Ketersediaan anggaran, personel yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Terakhir, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana perlu dievaluasi secara cermat. Memahami kemampuan serta kelebihan dan kelemahan agen pelaksana akan membantu dalam menempatkan mereka pada peran yang sesuai serta memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program dengan efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini secara holistik, pelaksanaan kebijakan Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Dalam Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya) adalah metode kualitatif. Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses dan praktik yang terjadi dalam pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan, pendapat, dan pengalaman langsung dari para pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat BKPSDM, staf, dan pihak terkait lainnya.

Setelah data terkumpul, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, di mana data yang terkumpul disaring dan diorganisir untuk fokus pada inti dari penelitian. Selanjutnya, data tersebut ditampilkan (display data) dalam bentuk yang dapat dimengerti dan dianalisis lebih lanjut. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, serta penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang relevan.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pegawai sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya menunjukkan kompleksitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek geografis, politik, regulasi, budaya, sosial, ekonomi, teknologi, dan infrastruktur. Geografis dan sosial-ekonomi Kota Tasikmalaya mempengaruhi kebutuhan akan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sementara politik dan regulasi daerah memberikan landasan hukum dan arah bagi implementasi kebijakan. Faktor budaya, ekonomi, teknologi, dan infrastruktur juga memainkan peran penting dalam efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan ini melibatkan dua aspek penting: dukungan keberlangsungan program dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta penting untuk menjaga momentum dan komitmen terhadap implementasi kebijakan. Perubahan kebijakan memerlukan penyesuaian strategi dan pendekatan dalam lingkungan yang terlibat, mulai dari struktur organisasi hingga perilaku individu.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan beragam perspektif terhadap implementasi kebijakan ini. Langkah-langkah konkret telah diambil, seperti penetapan formasi jabatan, pelatihan, dan pengembangan karir. Meskipun demikian, terdapat perubahan kebijakan yang mempengaruhi strategi dan pelaksanaan program, seperti persyaratan sertifikasi dan perubahan golongan. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dan adaptasi dalam menghadapi dinamika lingkungan.

Hasil dari FGD menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi dari pihak terkait, namun terdapat tantangan dalam menjaga keberlangsungan program. Perubahan kebijakan, terutama terkait dengan persyaratan sertifikasi dan golongan, serta ketersediaan dukungan, menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Secara keseluruhan, pembahasan menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun langkah-langkah konkret telah diambil, penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan peningkatan dukungan menjadi kunci untuk kesuksesan jangka panjang dalam pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya menyoroti urgensi hubungan antar organisasi dalam proses tersebut. Kolaborasi antar berbagai entitas, seperti Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, lembaga pengadaan barang/jasa, badan kepegawaian, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kerjasama memungkinkan pertukaran informasi yang efektif, koordinasi yang diperlukan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hubungan yang solid antar organisasi juga membangun kemitraan jangka panjang yang memperkuat kapasitas masing-masing pihak dan mempromosikan inovasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kerjasama antar organisasi telah berjalan baik, namun terdapat hambatan terutama terkait dengan aspek anggaran dan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun demikian, penilaian terhadap efektivitas implementasi program cenderung positif, menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan karier pegawai. Pembagian tugas antar instansi juga dinilai telah dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan terkait kekurangan SDM yang mampu dalam hal pengelolaan barang/jasa di beberapa organisasi.

Selain itu, ditemukan bahwa evaluasi program secara berkala dan koordinasi yang baik antarinstansi terkait sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi program. Pembagian tugas yang jelas dan diselaraskan juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap aspek program dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan peran dan kompetensi masing-masing organisasi terlibat.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar organisasi, evaluasi program yang teratur, dan pembagian tugas yang jelas merupakan elemen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, hubungan antar organisasi menjadi pondasi yang vital dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dari implementasi kebijakan tersebut, untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari temuan-temuan yang disajikan dalam penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting terkait dengan implementasi kebijakan Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya. Sumber daya organisasi, terutama sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan teknologi, memainkan peran utama dalam kesuksesan kebijakan tersebut.

Pertama-tama, sumber daya manusia yang terampil, terlatih, dan memahami kebijakan menjadi aspek utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun ada cukup banyak SDM yang tersedia, masih terdapat kekurangan dalam jumlah dan kualitas SDM yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait program tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Kedua, ketersediaan anggaran mempengaruhi secara langsung pelaksanaan kebijakan. Meskipun anggaran yang memadai sangat penting, masih terjadi kendala dalam alokasi dan penggunaannya. Proses alokasi anggaran yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lapangan dapat menghambat kelancaran program. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta memastikan alokasi yang tepat sesuai dengan prioritas program.

Ketiga, infrastruktur teknologi juga menjadi faktor krusial dalam mendukung implementasi kebijakan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat

mempercepat dan memudahkan proses pengadaan barang/jasa, serta memantau pelaksanaan program secara lebih efektif. Keempat, ketergantungan program terhadap sumber daya manusia menjadi isu yang signifikan. Program ini sangat bergantung pada keahlian dan pemahaman mendalam dari SDM yang terlibat. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, diperlukan strategi seperti pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penerapan teknologi digital.

Dengan demikian, kesimpulannya, sumber daya organisasi yang dikelola dengan baik dan optimal sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya. Perlu adanya koordinasi yang baik antara semua aspek sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi, untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Upaya-upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya organisasi guna mendukung implementasi kebijakan dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan terkait Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Karakteristik dan kemampuan pelaksana kebijakan memegang peran kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi ketersediaan dan kemampuan pelaksana, perubahan struktur birokrasi, pemahaman terhadap norma dan etika, serta komitmen petugas merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan.

Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan implementasi kebijakan secara menyeluruh. Strategi seperti peningkatan pelatihan, perbaikan koordinasi, penguatan struktur birokrasi, dan penegakan norma etika dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dalam menjalankan kebijakan publik dengan baik. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kemampuan pelaksana kebijakan serta upaya untuk mengatasi tantangan yang muncul menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian tentang implementasi kebijakan Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BKPSDM Kota Tasikmalaya menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk geografis, politik, regulasi, budaya, sosial, ekonomi, teknologi, dan infrastruktur. Dukungan keberlangsungan program dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan adalah aspek penting dalam proses implementasi. Kerjasama antar organisasi, terutama antara Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, lembaga pengadaan barang/jasa, badan kepegawaian, dan



sektor swasta, menjadi kunci untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sumber daya organisasi, khususnya sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi, memainkan peran utama dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas kebijakan secara menyeluruh. Evaluasi ketersediaan dan kemampuan pelaksana, perubahan struktur birokrasi, pemahaman terhadap norma dan etika, serta komitmen petugas merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Program Pascasarjana Kebijakan Publik, FISIP Unpad Bandung.
- Andi Hakim Matondang. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara). Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.
- Bohlander, G., & Snell, S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. In *Jakarta: Elex Media Komputindo*. <https://doi.org/10.1017/S0033291702006190>
- Syarifuddin, 2019. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa E-Procurement Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.